



**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU**

**DI ERA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019**

**TESIS**

**NARWANTO**

**1910622047**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA (S2) ILMU HUKUM  
2021**



**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU**

**DI ERA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum**

**NARWANTO**

**1910622047**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA (S2) HUKUM  
2021**

## PERNYATAAN ORISINILITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang diirjuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Naovanto, SH.  
NJK - 1910622047  
Tanggal Juli 2021

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya inJ, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juli 2021

Yang Menyatakan



Narwanto, SH.

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . Narwanto, SH.  
NRP 1910622047  
Program Studi : Ilmu Hukum.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti (*Non Exclusive Right to Publish*) atas karya ilmiah saya yang berjudul

**PENGHAKIMAN TINDAK PIDANA PEMILU  
DI ERA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti ini dinyatakan bahwa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat di

Pada tanggal : 22 Juli 2021

Yang menyatakan,



Narwanto, SH.

## PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

Nama Narwanto, S.H.  
NIK 1910622047  
Program Studi Ilmu Hukum  
Judul Yesis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu ñi Era Pemilu Serentak Tahun 2019

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Penguji dan Pembimbing serta telah diterima sebagai bahan persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Pembangunan Nasional Veteran Jakarta:

Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LLM

Ketua Penguji

Dr. Slamet Tri Wahvudi, SH, MH

Pengaji

Dr. Supardi, SH, MH

Pembimbing



Dr. H. Abdul Halim, M. Ag

Dekan

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LLM

Ketua Program Studi

## ABSTRAK

Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 juga harus diikuti dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu.. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terdapat 2.724 laporan dan temuan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu, yang berlanjut ke penyelidikan 582 kasus, berhenti di tahap penyelidikan ada 132 kasus, kemudian berhenti di penuntutan 41 kasus, disidangkan dan diputus oleh pengadilan 319 kasus. Sedangkan dari data Indonesian Legal Rountable (ILR) dari keseluruhan perkara yang disidangkan di pengadilan dalam perkara tindak pidana Pemilu terdapat 170 atau 53 % divonis pidana bersyarat atau percobaan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penanganan terhadap pelanggaran pidana Pemilu sampai tahap persidangan oleh Bawaslu menjadi cermin bahwa penegakan hukum pelanggaran tindak pidana Pemilu tahun 2019 dirasakan belum optimal. Penyelenggaraan Pemilu serentak semestinya diimbangi dengan penegakan hukum yang mampu memberikan efek jera melalui penjatuhan pidana bagi pelaku pelanggaran tindak pidana pemilu, tidak sekedar bentuk hukuman percobaan sehingga dapat memberikan kewibawaan hukum pidana Pemilu sekaligus sebagai *deterent effect* agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama, sehingga perlu formulasi hukum tindak pidana pemilu untuk masa yang akan datang melalui perumusan aturan secara pasti, jelas, tidak multitafsir, lebih efektif serta dilaksanakan oleh sumber daya penegak hukum yang kompeten putusan hakim dalam perkara tindak pidana pemilu juga memperhatikan semua pihak dalam kesetaraan hak setiap dan mencerminkan rasa keadilan, demi terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemilu, Pemilu 2019

## **ABSTRACT**

The implementation of the 2019 General Election shall be followed by the law enforcement against violations in the conduct of the General Election. Based on data released by The General Election Supervisory Agency (Bawaslu) there were 2,724 reports and findings of alleged violations of election crimes, which continued with the investigation of 582 cases, closed at the investigation stage there were 132 cases, then closed at prosecuting 41 cases, and adjudicated by the court in 319 cases. Meanwhile, based on the Indonesian Legal Roundtable (ILR) data, overall 170 or 53% of cases on trial regarding to the election crime cases were sentenced to conditional or probationary. Based on the above matter, in tackling of criminal election violations up to the trial stage by Bawaslu was being a reflection that law enforcement of the election crime in the General Election 2019 was not worked optimal. Implementation of the simultaneous General Elections shall be balanced with law enforcement that is able to provide a deterrent effect through the imposition of criminal penalties for violators of election crimes, not just a form of probation, hence it could provide the authority of election criminal law as well as a deterrent effect so that others do not committed with the same act. Therefore, it is necessary needed a legal formulation of election crimes in the the future is needed through the formulation of rules which are definite, clear, not multi-interpretive, more effective and implemented by competent law enforcement resources. Moreover, the judge's decision in the case of the election crimes shall pay attention to all parties in the equality of the individual rights before the law and able to reflects a sense of justice, in order to establish a General Election which would be honest and fair as well as legitimate.

**Keywords :** Law enforcement, Election Criminal Law, General Election 2019

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan berkat yang telah dilimpahkan, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis dengan judul **Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Era Pemilu Serentak Tahun 2019.**

Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta serta mencapai gelar Magister Hukum periode tahun 2021. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan tesis ini:

1. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan tesis ini.
2. Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Dr. H. Abdul Halim, M. Ag Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
4. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LLM Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
5. DR.Supardi,SH.,MH sebagai Pembimbing yang telah membimbing Penulis
6. Bapak dan Ibu dosen, Civitas Akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;



7. Istri saya tercinta dr. Tri Handayani Sp THT KL, yang selalu mensupport dan mendampingi saya, anak tercinta saya Samuel Alden Pratama, keluarga besar Karosono Dipomo, serta keluarga besar Bp. YL Sukiman yang selalu memberikan doa dan semangat kepada saya;
8. Teman-teman seperjuangan di Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
9. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan para pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, dengan senang hati; penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Jakarta, 22 Juli 2021

Penulis,



Narwanto, SH.

## DAFTAR ISI

HALAM SAMPUL.....	i
PERNYATAN ORISINALITAS .....	ii
PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Perumusan Masalah.....	5
I.3. Tujuan Penelitian.....	5
I.4. Manfaat Penelitian.....	6
I.5. Kerangka Teori dan Konseptual .....	6
1.5.1. Kerangka Teori .....	6
1.5.2. Kerangka Konseptual .....	19
I.6. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
II.1. Beberapa Tahapan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2019 dan Penerapan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. ....	34
II.2. Penanganan Tindak Pidana Pemilu.....	36
II.3. Pengaturan Hukum Acara Pidana di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.....	37
II.4. Sistem Peradilan Pidana Pemilu Sistem Bagian dari Rezim Hukum Pidana.....	40
II.5. Waktu Penanganan yang Singkat Penanganan Tindak Pidana Pemilu .....	42
II.6. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemilu .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
III.1 Metode Penelitian.....	51
III.2 Tipe Penelitian.....	51
III.3 Pendekatan Penelitian .....	52
III.4. Sifat Penelitian .....	53
III.5. Sumber Data .....	54
III.6. Metode Pengumpulan Data.....	55

III.7. Metode Analisis Data .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
IV. 1. Penegakkan Hukum Pemilu Melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).....	58
IV. 2. Peran Penting Peradilan Pemilu.....	62
IV. 3. Disparitas Putusan Tindak Pidana Pemilu .....	64
IV. 4. Putusan Perkara Pidana Pemilu yang Divonis Bersyarat atau Diputus Ringan .....	64
IV 5. Analisis Putusan Perkara Pidana Pemilu 2019 yang Divonis Bersyarat atau Diputus Ringan.....	67
IV. 6. Kendala Penegakan Tindak Hukum Pidana Pemilu Presiden, Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif yang Diselenggarakan Tahun 2019 .....	79
IV. 7. Penegakan Hukum Pemilu yang Akan Datang dalam Menjaga dan Menegakkan Marwah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.....	83
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
V.1. Kesimpulan .....	89
V.2. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	